

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH
Suatu Studi Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud**

**FERALIEN SEMBEL
JOHNNY H. POSUMAH
VERY Y. LONDA**

abstract: The implementation of the SIMDA policy in the BPKAD regency of the Talaud islands has been implemented since 2007. But in the implementation of this policy it is still not work properly. There are still obstacles in implementing this policy. Such as frequent occurrences of interference/damage to network application system, facilities and supporting infrastructure such as computer which is inadequate, besides the limited ability of human resources possessed, and the placement of employees who are not yet in accordance with their competencies and capabilities. Besides that, BPKAD regency of Talaud islands relies on the BPKP in the preparation of regional government financial reports. Thus the conclusion that can be drawn from the results of this research is that communication in the implementation of the SIMDA policy in BPKAD Talaud islands regency has been carried out before this policy was implemented through socialization, meetings, and coaching activities at each meeting. The amount of human resources owned are sufficient, but in their placement it is not in accordance with the competencies and capabilities as well as facilities and infrastructure that are inadequate. The attitude of the implementer SIMDA in BPKAD Talaud islands regency is very good, this can be seen from the value of professional integrity, commitment, sincerity, and the synergy between the leadership and staff in carrying out their duties. Bureaucratic structure, in carrying out its duties, employees have referred to the existing standard operating procedures, as well as the distribution of tasks and responsibilities to each field in accordance with their main tasks and functions.

Key word: *The Implementation of regional financial, management information system policies.*

PENDAHULUAN

Dengan adanya perkembangan teknologi sistem informasi (TSI) dan kebutuhan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai, maka dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pemanfaatan teknologi dengan menggunakan aplikasi.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dimana mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengolahan transaksi akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, didalam PERMENDAGRI ini menjelaskan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah tersebut, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/pengguna barang juga mempunyai kewajiban memberikan pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Untuk itu, diperlukan pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka merancang dan menerapkan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hampir setiap tahun, temuan pemeriksaan yang menjadi perhatian BPK dan mempengaruhi

opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah sistem pengendalian intern yang masih lemah dan pengelolaan aset yang belum memadai. Oleh sebab itu, selain pemahaman yang baik mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan sebuah tindakan preventif yang akan mencegah pemerintah daerah melakukan kesalahan yang berulang, sehingga efektif dan efisiensi dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mendukung kredibilitas dari pemerintah Daerah. Sebagai bentuk terobosan dalam mempermudah pengelolaan dan penatausahaan keuangan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Manado, dalam penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud. Kerja sama penerapan SIMDA ini telah dimulai sejak Tahun 2007 sampai saat ini. Semenjak diterapkannya SIMDA dalam pengelolaan keuangan di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terus meningkatkan kerja sama dengan BPKP Perwakilan Manado, melalui pengembangan program aplikasi SIMDA. Sehingga BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerapkan program aplikasi SIMDA Keuangan.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan aplikasi SIMDA ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Kepulauan Talaud, karena melalui manajemen sistem keuangan yang berbasis komputer dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, SIMDA mampu menjembatani antara pengelolaan keuangan di tingkat SKPD dengan SKPKD serta tercipta pengelolaan keuangan dan penyajian Laporan

Keuangan ditingkat daerah yang cepat, akurat, dan akuntabel.

Meski demikian pengoperasian aplikasi SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud ini masih belum optimal, dimana dalam sub sistem input atau pengumpulan data dari tiap-tiap SKPD sudah berjalan meskipun masih secara manual, yang dilakukan oleh operator masing-masing SKPD karena belum terintegrasinya SKPD dengan SKPKD melalui jaringan komunikasi data online. Dalam sub sistem proses, data yang masuk dari tiap-tiap SKPD sudah mampu diproses dengan komputerisasi melalui aplikasi SIMDA dan disimpan di bank data yang telah berfungsi dengan baik. Namun Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud ini belum memadai, dalam hal fasilitas penunjang (sarana dan prasarana) seperti jumlah komputer yang dimiliki belum mencukupi, masih terbatas dengan jumlah yang dibutuhkan.

Berbagai hambatan lain dalam pengimplementasian SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu dalam hal komunikasi, seperti sering terjadinya gangguan/kerusakan pada jaringan dan sistem aplikasi. Tentunya keadaan ini dapat menyebabkan proses pengelolaan keuangan menjadi terganggu, sehingga membutuhkan waktu beberapa hari untuk memperbaiki gangguan/kerusakan tersebut, karena BPKAD harus menghubungi BPKP Pusat di Jakarta untuk dapat memperbaikinya. Selain itu terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, mengakibatkan sering terjadinya kesalahan pengimputan data baik Penganggaran, Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan. Jika dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) operator SIMDA maupun pegawai pengelola keuangan, bidang ilmu yang dimiliki tidak sesuai. Karena sebenarnya yang lebih berkompeten untuk mengelola aplikasi SIMDA adalah pegawai yang menguasai teknologi informatika disamping penguasaan terhadap pengelolaan keuangan.

Disamping itu semenjak diterapkannya SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud sampai saat ini, penyusunan LKPD masih sangat bergantung pada pendampingan BPKP Perwakilan Manado.

Bertolak dari berbagai permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud”.

Konsep Implementasi Kebijakan

Abdul Wahab (1997:53) dalam Tahir (2014:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Ini berarti setelah suatu keputusan diambil, langkah berikutnya adalah bagaimana keputusan itu diimplementasikan.

Model Implementasi Kebijakan

Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut teraktualisasi. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Berbagai model implementasi kebijakanpun dikembangkan para ahli diantaranya Model George C. Edward III.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, George C. Edward III (1980:10) dalam Tahir (2014:61) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi (*Communication*)

Edward III (1980:10) dalam Tahir (2014:62) menegaskan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Faktor sumber daya menurut Edward III (1980:10) dalam Tahir (2014:66) menjelaskan bahwa sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat didalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya untuk memberikan pelayanan.

3. Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Edward III (1980:11) dalam Tahir (2014:68) menegaskan sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Edward III (1980:11) dalam Tahir (2014:70) menjelaskan meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi, dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi

kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi.

Konsep Sistem Informasi Manajemen

Menurut Robert G. Mundick dan Joel E. Ross dalam Sunyoto (2014:5) mengemukakan sistem informasi manajemen adalah proses komunikasi dimana informasi masukan (*input*) direkam, disimpan dan diperoleh kembali (diproses) bagi keputusan (*output*) mengenai perencanaan, pengoperasian dan pengawasan. Definisi lainnya juga dikemukakan oleh Gordon B. Davis dalam Sunyoto (2014:5) yang menyatakan sistem informasi manajemen adalah sistem manusia/mesin yang terpadukan untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah atau lebih dikenal dengan nama SIMDA merupakan sebuah aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Tim Aplikasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dengan tujuan membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Dengan aplikasi ini, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Fitur-fitur yang digunakan pun cukup sederhana, mudah dimengerti dan dipelajari. Dengan melakukan transaksi keuangan pemerintah daerah sehari-hari menggunakan aplikasi ini (output dokumen transaksi seperti Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)), secara otomatis catatan dan laporan keuangan dapat dihasilkan (output catatan akuntansi seperti buku jurnal, buku besar, dan laporan).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Moleong (2005:6) dalam Herdiansyah (2010:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai maksud untuk memahami suatu fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian, seperti misalnya persepsi, motivasi, tindakan, perilaku, dan lain sebagainya.

Sebagaimana jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana Creswell (2004) dalam Sudaryono (2017:82) mendefinisikan metode deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.

Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud, yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menerapkan SIMDA. Kantor BPKAD ini bertempat di Jalan Bui Batu Kompleks Perkantoran Pemda Talaud Melonguane.

Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Moleong (2004:237) mengemukakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang baik. Dalam penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan didasari pada teori George C. Edward III (1980:9) dalam Tahir (2014:61), dimana dalam mengembangkan teori implementasi kebijakan terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yakni Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi.

Informan Peneliti

Kerlinger dalam Idrus (2009:91) mendefinisikan informan sebagai orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti, yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.

Berkaitan dengan penelitian Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud, maka peneliti memilih beberapa informan untuk dijadikan sampel penelitian yang berjumlah 8 (delapan) orang, mereka adalah Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan staf pengelola keuangan yang terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Seretaris Badan;
- c. Kepala Bidang Akuntansi;
- d. Kepala Bidang Anggaran;
- e. Staf operator SIMDA 1 (orang);
- f. Staf pengelola keuangan yang berjumlah 3 orang

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Teknik Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nasution (2003:113) dalam Sudaryono (2017:212) wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan implementasi kebijakan SIMDA yang dilaksanakan di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Teknik Observasi/Pengamatan

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua

diantaranya adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau sebenarnya sedang terjadi, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana penunjang, proses pengimputan data serta kendala-kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian.

3. Teknik Studi Dokumentasi

Teknik Studi Dokumentasi menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Data yang diperlukan dalam penelitian Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud adalah data mengenai profil BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud, serta dokumen lainnya berupa Surat Keputusan (SK) terkait dengan implementasi kebijakan SIMDA yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif model Miles dan Faisal (2003) dalam Wiratna (2015:34) analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal yang penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data berarti data yang diperoleh dikategorisasikan menurut

pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi, dengan teknik triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil deskripsi wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan pegawai yang ada di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan rangkuman hasil wawancara tersebut dilihat dari 4 (empat) faktor keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980:9) dalam Tahir (2014:61) adalah sebagai berikut.

1. Faktor Komunikasi

- a. Pegawai sebagai pelaksana kebijakan memahami makna dan tujuan implementasi kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud.
- b. Komunikasi yang dilakukan di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam implementasi kebijakan SIMDA adalah melalui kegiatan rapat, sosialisasi, maupun pembinaan dalam setiap pertemuan.

- c. Tersedia buku panduan dalam mengimplementasikan kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud.
- d. Hambatan didalam komunikasi penerapan SIMDA di BPKAD adalah sering terjadinya gangguan atau kerusakan pada jaringan.

2. Faktor Sumber Daya

- a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai dalam menerapkan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud sudah mencukupi.
- b. Penempatan SDM belum sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya.
- c. Pegawai pelaksana kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud telah dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis.
- d. Adanya ketersediaan dana dalam pengimplementasian kebijakan, serta pemberian insentif berupa tambahan penghasilan bagi pejabat dan pelaksana kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud.
- e. Dalam melaksanakan tugas tim pengelola SIMDA mengacu pada peraturan yang ditetapkan.
- f. Surat Keputusan merupakan dasar penerapan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud.
- g. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud belum memadai.

3. Faktor Sikap Pelaksana

- a. Semua pegawai setuju dengan penerapan kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud.
- b. Implementator kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud memahami sepenuhnya manfaat penerapan SIMDA.
- c. Integritas, profesionalisme, komitmen, ketulusan dan sinergitas merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh pimpinan dan staf dalam menerapkan kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud.

4. Faktor Struktur Birokrasi

- a. Didalam implementasi kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud, terdapat pembagian kewenangan antara user, admin, asisten admin dan operator.
- b. Penyusunan LKPD masih membutuhkan pendampingan BPKP sebagai pengemban SIMDA.
- c. Terdapat SOP yang digunakan dalam penerapan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud.
- d. Telah dilakukan penyebaran tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pembahasan

Dengan melihat deskriptif hasil penelitian yang telah menggambarkan Bagaimana Implementasi Kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud dilihat dari 4 (empat) faktor keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980:9) dalam Tahir (2014:61) maka interpretasi dan pembahasan hasil penelitian tersebut diuraikan berikut ini.

1. Komunikasi

Edward III (1980:10) dalam Tahir (2014:62) menegaskan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu.

Dalam implementasi kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud, komunikasi telah aktif dilaksanakan. Pelaksana kebijakan atau staf mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dengan jelas, karena pimpinan sebagai penanggung jawab kebijakan dapat mengkomunikasikan hal-hal yang akan dilaksanakan dengan perintah yang jelas. Salah satu wujud komunikasi yang telah dilaksanakan dengan baik, pegawai sebagai pelaksana kebijakan dapat memahami makna, dan tujuan dari penerapan kebijakan. Hal ini

dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan pegawai yang ada di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud, yang umumnya mereka telah mengetahui makna, dan tujuan penerapan SIMDA.

Edward III dalam Tahir (2014:63) juga mengungkapkan jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki.

Proses komunikasi didalam implementasi kebijakan SIMDA yang dilaksanakan di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud sudah jelas, akurat dan konsisten dilakukan. Karena instruksi kebijakan sebelum dilaksanakan dapat ditransmisikan oleh pimpinan/kepala badan sebagai penanggung jawab kebijakan kepada pegawai pelaksana dengan tepat, dan jelas. Transmisi instruksi kebijakan yang dilaksanakan di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud melalui kegiatan rapat, sosialisasi, maupun pembinaan dalam setiap pertemuan.

Dengan adanya buku panduan dalam mengimplementasikan kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud, pegawai sebagai pelaksana kebijakan dapat dengan mudah melaksanakan instruksi kebijakan yang diberikan oleh pimpinan. Namun disisi lain komunikasi dalam pengimplementasian kebijakan SIMDA di BPKAD tidak lepas dari hambatan yang ada. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap proses pengolahan data yang dilakukan di ruang enteri data SIMDA yang berada di gedung kantor BPKAD, pegawai pelaksana kebijakan begitu antusias didalam melakukan pengimputan

data penganggaran maupun penatausahaan, namun kadang kala proses pengimputan data ini terhenti, oleh karena sering terjadinya gangguan atau kerusakan pada jaringan, hal ini tentunya dapat mengakibatkan keterlambatan didalam *output* yang dihasilkan yaitu laporan keuangan.

Kondisi tersebut sebagaimana yang dikemukakan Edward III dalam Tahir (2014:64) dimana kesempurnaan suatu kebijakan ketika akan diimplementasikan, maka instruksi implementasi tidak hanya dapat diterima saja tapi pesan-pesan didalamnya harus dapat diterima dengan jelas. Jika tidak maka para pelaksana akan mengalami kesulitan mengenai tindakan yang harus dilakukan, mereka akan leluasa menafsirkan implementasi kebijakan tersebut, sebuah penafsiran yang mungkin saja berbeda dengan maksud atasannya.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting didalam keberhasilan implementasi kebijakan SIMDA yang dilaksanakan di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud. Edward III (1980:10) dalam Tahir (2014:67) mengemukakan jika sumber daya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi, maka sumber daya pelaksana dipahami sebagai kemampuan pelaksana. Kemampuan pelaksana meliputi kemampuan sumber daya, komitmen, otoritas, koordinasi antar pelaksana dan budaya yang dianut. Selain itu harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud, memiliki berbagai dinamika dalam hal sumber daya yang dimiliki. Dari hasil wawancara yang dilakukan dimana jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai dalam menerapkan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud sudah mencukupi, posisi jabatan

dalam bidang maupun seksi sampai pada staf telah terisi sebagaimana mestinya. Namun didalam penempatan SDM masih belum sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya. Karena terdapat pegawai yang ditempatkan pada bidang yang tidak sesuai dengan keahlian, dan latar belakang bidang ilmu yang dimiliki.

Meskipun demikian pegawai pelaksana kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud telah dibekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis, serta dalam melaksanakan tugas tim pengelola SIMDA mengacu pada peraturan yang ditetapkan, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan yang menjadi dasar penerapan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Disamping itu Edward III dalam Tahir (2014:68) juga mengutarakan dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Informasi yang demikian juga penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Dalam proses implementasi kebijakan SIMDA yang dilakukan di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud juga didukung oleh ketersediaan dana yang dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kabupaten Kepulauan Talaud pada DPA BPKAD. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja implementator, yaitu dengan pemberian insentif berupa tambahan penghasilan bagi pejabat dan pelaksana kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemberian insentif ini berdasarkan beban kerja dari masing-masing pegawai pelaksana.

Jika dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan

Talaud, seperti komputer yang digunakan dalam pengimputan data SIMDA belum memadai. Kondisi ini membuat para pegawai dalam melaksanakan tugas pengimputan data harus menggunakan fasilitas milik pribadi mereka, seperti laptop.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Edward III (1980:10) dalam Tahir (2014:66) bahwa sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat didalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya untuk memberikan pelayanan.

3. Sikap Pelaksana

Faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Dalam implementasi kebijakan SIMDA yang dilaksanakan di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud mendapat dukungan sepenuhnya pelaksana kebijakan yaitu pegawai. Dukungan ini dinyatakan dalam hasil wawancara, dimana semua pegawai BPKAD setuju dengan penerapan kebijakan SIMDA. Hal ini karena para pegawai telah merasakan manfaat dari penerapan SIMDA yang sangat membantu didalam pelaksanaan tugas. Karena keamanan data tetap terjamin, kecepatan dan ketepatan waktu, bebas dari kesalahan pencatatan dan perhitungan serta laporan atau *output* yang dihasilkan akurat dan relevan.

Kesadaran akan pentingnya penerapan kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud dinyatakan dalam sikap yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugasnya para pegawai baik pimpinan maupun staf pelaksana memiliki nilai-nilai integritas, profesionalisme, komitmen, ketulusan dan sinergitas.

Sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten

Kepulauan Talaud ini, sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan Edward III (1980:11) dalam Tahir (2014:68) jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Edward III (1980:11) dalam Tahir (2014:70) menjelaskan meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi, dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi.

Didalam implementasi kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud, pengaturan struktur birokrasi dilakukan dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas bagi tim pengelola SIMDA baik antara user, admin, asisten admin dan operator. Selain itu, dilakukan penyebaran tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pengaturan struktur birokrasi ini dilakukan untuk efisiensi pelaksanaan tugas kebijakan.

Akan tetapi meskipun telah dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, serta adanya penyebaran tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya, tetap masih saja terdapat kelemahan didalam struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan SIMDA ini. Hal ini dikarenakan ketergantungan dari BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap BPKP perwakilan Manado didalam penyusunan LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud terus membutuhkan pendampingan dari BPKP sebagai pengemban aplikasi SIMDA. Kondisi ini menunjukkan lemahnya struktur birokrasi yang dimiliki, ketidakmampuan bidang-bidang yang ada di

BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Disamping itu, didalam mengimplementasikan kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud, telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya. Dengan adanya SOP diharapkan para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan, mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan. Sehingga melalui pelaksanaan tugas yang berdasarkan SOP diharapkan efisiensi dan efektifitas dalam implementasi kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud dapat terwujud.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, implementasi kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud belum sepenuhnya efektif. Meskipun kebijakan sebelum diterapkan telah dikomunikasikan terlebih dahulu melalui kegiatan sosialisasi, rapat, maupun pembinaan dalam setiap pertemuan. Sehingga setiap implementator baik pimpinan maupun staf memahami makna, keunggulan dan manfaat dari penggunaan aplikasi SIMDA. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SIMDA ini konsisten karena berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun disisi lain komunikasi dalam pengimplementasian kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud masih mengalami hambatan. Dimana sering terjadinya gangguan atau kerusakan pada jaringan, hal ini tentunya dapat mengakibatkan keterlambatan didalam *output* yang dihasilkan yaitu laporan keuangan.
2. Sumber Daya, implementasi kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud belum sepenuhnya efektif. Meskipun jumlah SDM pegawai yang dimiliki telah mencukupi, namun dalam penempatan SDM belum sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya serta fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai. Disisi lain pegawai sebagai pelaksana kebijakan telah dibekali dengan pelatihan atau bimbingan teknis tentang aplikasi SIMDA, serta dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada peraturan yang ditetapkan yaitu Surat Keputusan yang didalamnya juga mengatur tentang pembagian kewenangan antara user, admin, asisten admin dan operator yang merupakan pelaksana kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Sikap Pelaksana, implementasi kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud sudah efektif. Dalam efek disposisi ini ditemukan adanya respon yang baik dari para implementator yang setuju dengan penerapan kebijakan. Hal ini nampak dari nilai intergritas, profesionalisme, komitmen, ketulusan dan sinergitas yang dimiliki pimpinan maupun staf pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
4. Struktur Birokrasi, implementasi kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud belum sepenuhnya efektif. Didalam melaksanakan tugasnya, pegawai telah mengacu pada SOP yang ada, mulai dari proses penganggaran sampai pada penatausahaan. Juga dalam mengimplementasikan kebijakan ini telah dilakukan penyebaran tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akan tetapi, masih saja terdapat kelemahan didalam struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan SIMDA ini. Lemahnya struktur birokrasi yang dimiliki, ketidakmampuan bidang-bidang yang ada di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud

didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap BPKP perwakilan Manado didalam penyusunan LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud, dimana BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud terus membutuhkan pendampingan BPKP sebagai pengemban aplikasi SIMDA.

Saran

Meskipun implementasi kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud telah berhasil dilaksanakan, namun masih ada hal-hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan. Adapun saran yang dapat diajukan penulis sebagai hasil dari penelitian implementasi kebijakan SIMDA di BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi didalam implementasi kebijakan SIMDA di BPKAD harus diperjelas, dengan memperbaiki sistem aplikasi yang ada sehingga dapat mengatasi gangguan/kerusakan yang terjadi pada jaringan aplikasi.
2. Pembenahan SDM harus dilakukan melalui penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya, penambahan fasilitas sarana-prasarana komputer yang memadai.
3. Sikap pelaksana harus terus dipupuk, dikembangkan dan ditingkatkan. Sehingga nilai-nilai intergritas, profesionalisme, komitmen, ketulusan dan sinergitas akan terus dimiliki oleh pimpinan maupun staf pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
4. Struktur birokrasi harus diperkuat, melalui motivasi dan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan tugas dari bidang-bidang, sehingga bidang-bidang dapat maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.

- Miles, Matthew, B. dan Faisal, Sanapiah. 2003. *Pengumpulan dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Satgas Pengembangan SIMDA. 2008. *SIMDA dan Penerapannya*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Satgas Pengembangan SIMDA. 2011. *Bimbingan Teknis SIMDA Keuangan*.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto. 2014. *Sistem Informasi Manajemen (Perspektif Organisasi)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian (Bisnis dan Ekonomi)*. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Sumber Lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Manajemen Keuangan Daerah, Simgaji Taspen, Simpatik Dan Sinergi Sisd, Siskeudes Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018.